



**PEMERINTAH
KOTA BANJAR**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar telah dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Tahun 2023, kami perlu melaporkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan amanah yang diemban, yaitu mengimplementasikan Renstra sesuai tahap-tahap yang telah ditetapkan, mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja dalam kurun waktu Tahun 2023. Hasil tersebut dituangkan dalam bentuk **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023”**.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa datang.

Banjar, 7 Pebruari 2024

Kepala,



ASEP MULYANA, S.E.

Pembina/ IVa

NIP. 19761004 200312 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indikator kinerja Utama BPKPD tahun 2023 meliputi 3 (*tiga*) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD.

Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran	Predikat
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	Opini/ Kategori	WTP	-	-	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persentase	21%	20,07%	95,57%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	Skor	73	-	-	-
		LKD BPKPD Tepat Syarat	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi

Dalam meningkatkan kinerja, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam bentuk memberikan masukan tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan, baik di bidang teknis operasional maupun di bidang administrasi, serta memberikan masukan tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Laporan Kinerja ini, dan diharapkan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Banjar, 7 Pebruari 2024

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Government of Banjar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANJAR" around the top edge and "BADAN KEHIMPUNAN KEJARAN DAN PERENCANAAN" around the bottom edge. In the center is the coat of arms of Banjar. A blue ink signature is written over the stamp.

ASEP MULYANA, S.E.

Pembina/ IVa

NIP. 19761004 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan	4
1.5. Gambaran Umum BPKPD Kota Banjar	4
1.5.1 Susunan Organisasi	6
1.5.2 Sumber Daya Manusia	15
1.5.3 Sarana dan Prasarana	18
1.5.4 Isu Strategis	21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi Misi Kota Banjar	23
2.1.1 Visi	24
2.1.2 Misi	25
2.2. Rencana Strategis BPKPD Tahun 2018-2023	25
2.3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	25
2.4. Perjanjian Kinerja	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	50
3.2. Capaian Kinerja	52
3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	52
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	56
3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	58
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	60

	3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Alternatif Solusi yang Dilakukan	60
	3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
	3.2.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	74
	3.3. Realisasi Anggaran	86
BAB IV	: PENUTUP	
	Penutup	88
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5.2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat
Tabel 1.5.2.2	ASN pada BPKPD Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Tabel 1.5.2.3	ASN pada BPKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.5.3.1	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Tabel 1.5.3.2	Daftar Kendaraan BPKPD Kota Banjar
Tabel 1.5.4.1	Identifikasi Isu-isu Strategis BPKPD
Tabel 2.3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023
Tabel 2.3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023
Tabel 2.4.1	Indikator Kinerja Utama BPKPD
Tabel 2.4.2	Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023
Tabel 2.4.3	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2023
Tabel 2.4.4	Rencana Aksi BPKPD Tahun 2023
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja BPKPD Tahun 2023
Tabel 3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja BPKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023
Tabel 3.2.6	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKPD Tahun 2023
Tabel 3.2.7.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Bidang Perencanaan Anggaran Tahun 2023
Tabel 3.2.7.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Bidang Perbendaharaan Daerah Tahun 2023
Tabel 3.2.7.3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2023
Tabel 3.2.7.4	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023
Tabel 3.2.7.5	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023
Tabel 3.2.7.6	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sekretariat BPKPD Tahun 2023
Tabel 3.3	Realisasi BPKPD Belanja Daerah Tahun 2023

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.5.1.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perlu melaporkan hasil pelaksanaan kinerja sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Banjar.

Adapun tujuan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Sebagai sarana untuk memberikan informasi yang terukur kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Sebagai sarana informasi sejauh mana target yang telah dicapai oleh instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran;
3. Sebagai sarana untuk mengevaluasi diri terhadap capaian kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mengambil berbagai kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

1.4 Sistematika Penulisan

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta gambaran umum BPKPD Kota Banjar.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Penetapan tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Bab ini menyajikan capaian kinerja dan pengukuran kinerja, analisis efisiensi serta akuntabilitas keuangan.
- BAB IV PENUTUP**
Bab ini berisi ringkasan atau kesimpulan umum atas capaian kinerja serta uraian rencana yang akan dilakukan BPKPD Kota Banjar dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

1.5 Gambaran Umum BPKPD Kota Banjar

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Wali Kota Banjar bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, dalam Penjelasan I. Umum disebutkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomenklatur organisasinya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintah Kota Banjar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah wajib melaporkan kinerja sebagai hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2023 yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 3 (Ayat) 1 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai *tugas* membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan ASN pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai *tugas* sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- f. Memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. Memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang, keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- h. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

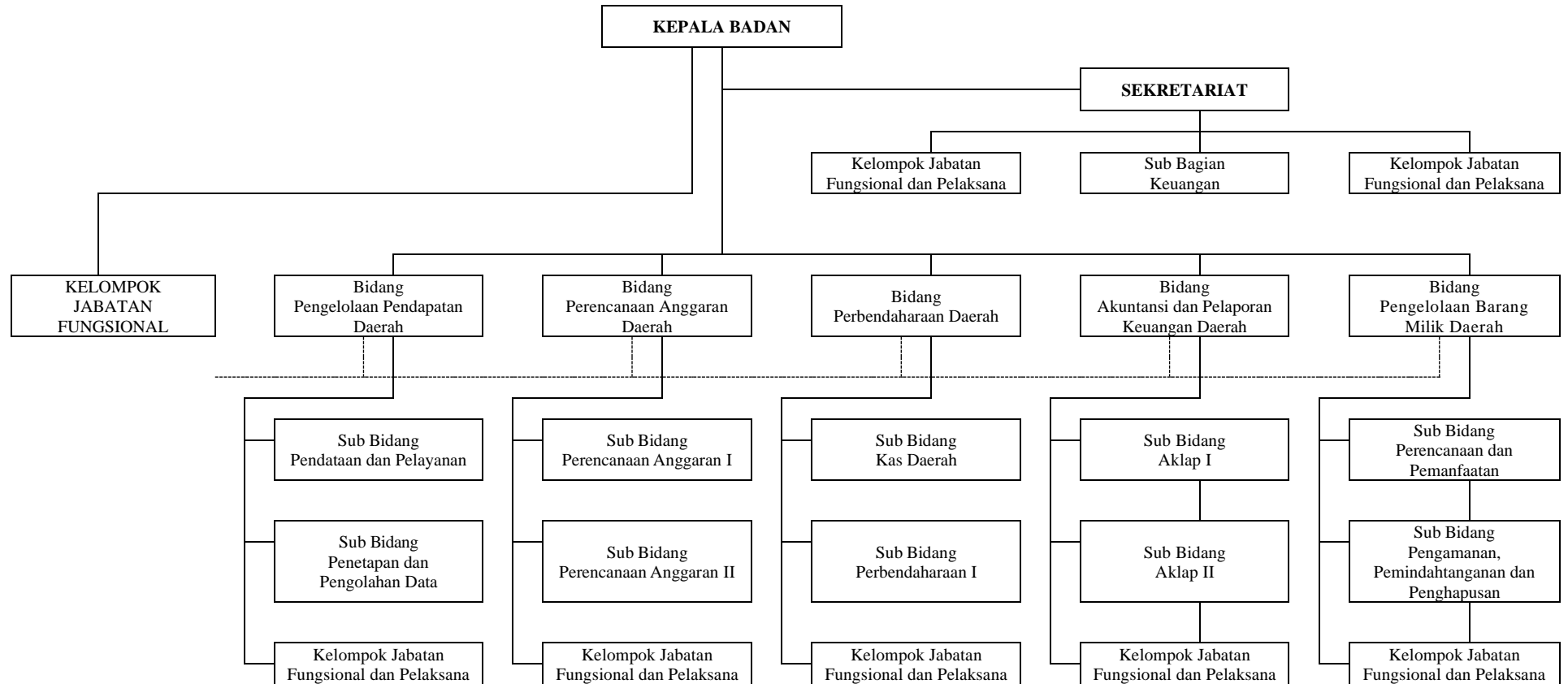
1.5.1 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan dan Pelayanan;
 - b. Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 4) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 5) Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Aklap I;
 - b. Sub Bidang Aklap II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 7) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - b. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 8) Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar digambarkan sebagai berikut:

BAGAN 1.5.1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANJAR



Secara Tipologi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tergolong ke dalam Tipe A terdiri atas 1 (*satu*) Sekretariat dan 5 (*lima*) Bidang, yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas badan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai *fungsi*:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Sekretariat, yaitu:

- a. Melakukan validasi rancangan kebijakan teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. Memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- f. Memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah; bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I serta bidang perencanaan anggaran II yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I dan bidang perencanaan anggaran II;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I dan bidang perencanaan anggaran II;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I dan bidang perencanaan anggaran II;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I dan bidang perencanaan anggaran II;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I dan bidang perencanaan anggaran II;
- c. Memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah bidang kas daerah, bidang perbendaharaan I yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang kas daerah, bidang perbendaharaan I;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang kas daerah, bidang perbendaharaan I;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang kas daerah, bidang perbendaharaan I;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Perbendaharaan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang kas daerah dan sub bidang perbendaharaan I;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang kas daerah dan bidang perbendaharaan I;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah bidang kas daerah dan sub bidang perbendaharaan I;
- d. Memimpin pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- e. Memimpin bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
- f. Memimpin bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- g. Memimpin proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- h. Memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang kas daerah, dan sub bidang perbendaharaan I;
- i. Memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- j. Memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I, dan sub bidang AKLAP II yang menjadi kewenangan daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- d. Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Memimpin penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Memimpin konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Memimpin penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. Memimpin pengkajian bahan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- i. Memimpin pengkajian bahan koordinasi dan jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Memimpin verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. Memimpin pengkajian konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. Memimpin evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota wilayah III;
- m. Memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pengelolaan keuangan daerah sub bidang AKLAP I dan sub bidang AKLAP II;
- n. Memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- o. Memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub aset daerah bidang perencanaan dan pemanfaatan, bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan serta bidang penatausahaan dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan, serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang aset daerah;
- e. Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
 - d. memimpin pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
 - e. memimpin pengkajian konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. memimpin pendokumentasian hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - g. memimpin rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - h. memimpin pelaporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - i. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis aset daerah sub bidang perencanaan dan pemanfaatan serta sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan;
 - j. memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang aset daerah;
 - k. memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah sub bidang pendataan dan pelayanan dan sub bidang penetapan dan pengolahan data yang menjadi kewenangan daerah. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
- d. Memimpin penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nihil;
- e. Memimpin penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Memimpin pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, penghapusan sanksi, serta penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah dan

- retribusi daerah;
- g. Memimpin penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
 - h. Memimpin penegakan sanksi perpajakan daerah;
 - i. Memimpin penyuluhan dan bimbingan kepatuhan serta kebijakan perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak;
 - j. Memimpin monitoring hasil penyuluhan terhadap wajib pajak;
 - k. Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. Memimpin pelaksanaan urusan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. Memimpin pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - n. Memimpin pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. Memimpin identifikasi pelanggaran perpajakan Daerah;
 - p. Memimpin pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - q. Memimpin pelaksanaan urusan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) dan penghapusan NPWPD;
 - r. Memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan daerah bidang pendataan dan pelayanan, bidang penetapan dan pengolahan data, serta bidang penagihan dan pengendalian;
 - s. Memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan daerah;
 - t. Memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2 Sumber Daya Manusia

SDM Aparatur memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar memiliki SDM Aparatur sebanyak 54

(lima puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di sejumlah unit kerja, yaitu 1 (*satu*) Sekretariat dan 5 (*lima*) Bidang.

Dari 54 (*lima puluh empat*) orang ASN tersebut, sebanyak 29 (*dua puluh sembilan*) orang menduduki jabatan struktural, yang terdiri atas 1 (*satu*) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II), 6 (*enam*) orang Pejabat Administrator (setara Eselon III), dan 11 (*Sebelas*) orang Pejabat Pengawas, 10 (*sepuluh*) orang menduduki jabatan fungsional, sedangkan sisanya sebanyak 26 (*dua puluh enam*) orang merupakan ASN yang menduduki jabatan pelaksana. Berikut jumlah ASN berdasarkan Pangkat.

Tabel 1.5.2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Fungsional	Pejabat Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	5	5
3	III	-	3	10	6	21	40
4	IV	1	3	1	-	-	5
Sub Jumlah		1	6	11	6	26	50
5	VII	-	-	-	1	-	1
6	IX	-	-	-	3	-	3
Sub Jumlah		-	-	-	4	-	4
Jumlah		1	6	11	10	26	54

Berdasarkan golongan/ruangnya, mayoritas ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar memiliki golongan III sebanyak 40 (*empat puluh*) orang, golongan II sebanyak 5 (*lima*) orang, serta golongan IV sebanyak 5 (*lima*) orang. Pegawai PPPK golongan VII sebanyak 1 (*satu*) orang dan pegawai PPPK golongan IX sebanyak 3 (*tiga*) orang.

Tabel 1.5.2.2
ASN pada BPKPD berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	I	0	0	0
2	II	5	0	5
3	III	23	17	40
4	IV	2	3	5
Sub Jumlah I		30	20	50

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5	VII	1	-	1
6	IX	2	1	3
Sub Jumlah II		3	1	4
Jumlah		33	21	54

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*) orang, sedangkan sisanya sebanyak 21 (*dua puluh satu*) orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.5.2.3

ASN pada BPKPD berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	7	2	9
4	D-3	5	1	6
5	D-4	0	2	2
6	S-1	18	10	28
7	S-2	4	5	9
Jumlah		33	21	54

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berpendidikan SLTA sebanyak 9 (*sembilan*) orang, Sarjana Muda (D-3) sebanyak 6 (*enam*) orang, D-4 sebanyak 2 (*dua*) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) orang, dan Magister (S-2) sebanyak 9 (*sembilan*) orang.

1.5.3 Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasaran yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar cukup memadai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5.3.1
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Transportable Generating Set	Unit	1	Baik
2	P.C Unit	Unit	50	Baik
3	Lap Top	Unit	13	Baik
4	Note Book	Unit	4	Baik
5	Tablet PC	Unit	27	Baik
6	Personal Komputer lainnya	Unit	2	Baik
7	Plotter (Peralatan Mainframe)	Unit	1	Baik
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	3	Baik
9	Monitor	Unit	2	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	57	Baik
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	3	Baik
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	3	Baik
13	Server	Unit	10	Baik
14	Router	Unit	1	Baik
15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	Baik
16	Pick Up	Unit	1	Baik
17	Sepeda Motor	Unit	21	Baik
18	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Unit	1	Baik
19	alat ukur universal lainnya (dst)	Unit	3	Baik
20	Scanner (Universal Tester)	Unit	7	Baik
21	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Unit	10	Baik
22	Rak-Rak Penyimpan	Unit	4	Baik
23	Lemari Kayu	Unit	8	Baik
24	Rak Besi	Unit	22	Baik
25	Rak Kayu	Unit	7	Baik
26	Filing Cabinet Besi	Unit	19	Baik
27	Brandkas	Unit	5	Baik
28	CCTV - Camera Control Television System	Unit	6	Baik
29	Papan Visual/Papan Nama	Unit	15	Baik
30	Alat Penghancur Kertas	Unit	7	Baik
31	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
32	Perforator Besar	Unit	2	Baik
33	Overhead Projector	Unit	1	Baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
34	LCD Projector/Infocus	Unit	1	Baik
35	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	1	Baik
36	Papan Nama Instansi	Unit	27	Baik
37	Papan Pengumuman	Unit	27	Baik
38	Alat Kantor Lainnya	Unit	1	Baik
39	Meja Kerja Kayu	Unit	27	Baik
40	Kursi Besi/Metal	Unit	13	Baik
41	Meja Rapat	Unit	23	Baik
42	Meja Resepsionis	Unit	2	Baik
43	Meja 1/2 Biro	Unit	27	Baik
44	Kursi Rapat	Unit	27	Baik
45	Kursi Tamu	Unit	4	Baik
46	Kursi Putar	Unit	15	Baik
47	Kursi Biasa	Unit	27	Baik
48	Sofa	Unit	15	Baik
49	Meubeleur lainnya	Unit	1	Baik
50	Mesin Pemetong Rumput	Unit	3	Baik
51	Lemari Es	Unit	2	Baik
52	A.C. Window	Unit	15	Baik
53	A.C. Split	Unit	28	Baik
54	Kipas Angin	Unit	2	Baik
55	Televisi	Unit	5	Baik
56	Loudspeaker	Unit	2	Baik
57	Sound System	Unit	2	Baik
58	Wireless	Unit	1	Baik
59	Camera Video	Unit	1	Baik
60	Tangga Aluminium	Unit	1	Baik
61	Dispenser	Unit	2	Baik
62	Coffee Maker	Unit	2	Baik
63	Alat Pemadam/Portable	Unit	11	Baik
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	4	Baik
65	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	15	Baik
66	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	10	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	5	Baik
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	14	Baik
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	27	Baik
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	5	Baik
71	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	19	Baik
72	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Unit	4	Baik
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	3	Baik

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
74	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	Unit	1	Baik
75	Camera Electronic	Unit	1	Baik
76	Facsimile	Unit	1	Baik
77	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya	Unit	1	Baik
78	Stabilizer	Unit	1	Baik
79	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	Unit	1	Baik
80	Generator	Unit	1	Baik

Tabel 1.5.3.2
Daftar Kendaraan BPKPD Kota Banjar

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
1	Pick Up	Suzuki / Carry 1,5 Pick Up Flat Deck	1493		Z 8048 X
2	Mini Bus	Toyota // Kijang Inova	1998		Z 1272 X
3	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 155 X	Z 1816 X
4	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 156 X	Z 1817 X
5	Mini Bus	Suzuki / Suzuki Futura ST 120	1.493		Z 302 X
6	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1.495		Z 1136 X
7	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1495		Z 1151 X
8	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 Mt	1495		Z 1196 X
9	Mini Bus	Toyota / Kijang Inova 2.0g At (Tgn140r Mdtksd)	1998		Z 15 X
10	Sepeda Motor	Yamaha / Vega-R	110		Z 2335 X
11	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2286 X
12	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2581 X
13	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2378 X
14	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 3p9	110		Z 2221 X
15	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2451 X
16	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2485 X
17	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2360 X
18	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SE	100	Z 2325 X	Z 6811 X
20	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 110 Cc 4d7	110		Z 2031 X
21	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2758 X
22	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2759 X

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
23	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2762 X
24	Sepeda Motor	Honda Revo / Cw	110		Z 2835 X
25	Sepeda Motor	Honda / Nc1183ca/T	108		Z 2846 X
26	Sepeda Motor	Honda / Nc11a3ca/T	108		Z 2847 X
27	Sepeda Motor	Honda Vario	108		Z 2857 X
28	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3098 X
29	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3103 X
30	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3116 X
31	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3095 X

1.5.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menggambarkan isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.5.4.1
Identifikasi Isu-isu Strategis BPKPD

No	Isu Strategis
1.	Kuantitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Aparatur BPKPD yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan terutama ASN yang mempunyai <i>talent digital</i> dan memiliki pemikiran yang bersifat <i>out of the box</i> dalam mewujudkan manajemen talenta;
2.	Belum optimalnya dukungan manajemen perkantoran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar;

No	Isu Strategis
3.	Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar;
4.	Pembinaan dan pengendalian internal yang masih kurang optimal;
5.	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6.	Kemandirian keuangan daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Capaian Kinerja.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

2.1 VISI DAN MISI KOTA BANJAR

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

2.1.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

**“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju
Banjar Agropolitan”**

Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah: **“Banjar Semakin Berseri”**. Kata **“Berseri”** pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: **BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI**. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut:

1. **Iman dan Taqwa** mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan;
2. **Bersih** mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel;
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut;
4. **Asri** mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah;

5. **Agropolitan** mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Banjar Semakin Berseri**”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

2.2 RENCANA STRATEGIS BPKPD TAHUN 2018-2023

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2023. Pada dasarnya penyusunan Perubahan Renstra BPKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra BPKPD Mendukung Misi 1 yaitu “**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel**”

2.3 PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah,

memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”.

➤ **Tujuan**

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2021-2023 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	18%	19%	20%	21%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKPD	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	64	69	70	72	73
		LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023

VISI	:	Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan		
MISI I	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;	1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal;	
		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan	2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;	
			1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam hal mendukung	

VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan			
MISI I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 2. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		3. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	1. Meningkatkan kualitas laporan aset daerah melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap Perangkat Daerah; 2. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas;
		4. Meningkatkan proses dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.	1. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan pembukuan di setiap Perangkat Daerah.
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan	1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui	1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;

VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan			
MISI I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pendapatan Asli Daerah	langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan dukungan regulasi pendapatan dan pelayanan; 4. Mengembangkan kerja sama pendapatan dan pelayanan; 5. Mengoptimalkan penyerapan penerimaan PBB dan BPHTB;

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja BPKPD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKPD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKPD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKPD.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKPD nomor 800/Kpts.185-BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

Indikator Kinerja Utama BPKPD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD
Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD
	LKD BPKPD Tepat Syarat

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/ sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023 dapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2

Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	21%
3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	73
		LKD BPKPD Tepat Syarat	100%

Untuk mencapai target-target tersebut maka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar menyusun rencana kinerja tahunan yang memuat program/kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, berikut uraiannya:

Tabel 2.4.3
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
BPKPD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya kualitas AKIP dan LKD	Nilai AKIP dan LKD BPKPD Tepat SYarat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	10.083.536.033
			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	21.783.650
			Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	7.732.750
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.560.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.660.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1.802.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1.560.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	3.883.500
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.585.400

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	7.266.711.953
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bln	7.224.216.253
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350	Dokumen	35.072.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	7.423.700
			KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIH DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	39.222.500
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	39.222.500
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	47.793.500
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53	Dokumen	47.793.500
			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	570.697.100
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.250.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	89.454.450
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	28.495.600
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	44.709.600
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	81.983.200
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66	Dokumen	6.630.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	12.335.000
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	216.901.000
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	50.938.250
			KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	258.465.170
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	Unit	216.465.170
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	Unit	42.000.000
			KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.297.395.800
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	586.955.600
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	710.440.200
			KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	581.466.360
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	Unit	356.213.400
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81	Unit	84.950.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Gedung	87.276.960
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	53.026.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	16,75	%	
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	89,71	%	
				Opini Laporan Keuangan	WTP		
				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,10	%	
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya	2,04	%	
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	%	
			KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	999.593.700
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	126.035.500
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	116.951.500
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen	103.556.000
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen	102.256.000
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen	95.484.000
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen	64.450.200
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	202.879.500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	187.981.000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
			KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	411.723.100
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76	Dokumen	101.560.600
			Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78	Dokumen	60.087.100
			Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11	Dokumen	104.881.750
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10	Laporan	35.868.000
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38	Dokumen	60.420.050
			Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	Dokumen	9.725.800
			Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Orang	39.179.800

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
			KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	292.688.500
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25	Laporan	91.649.000
			Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	85	Laporan	118.154.500
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	75.232.000
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3	Dokumen	7.653.000
			KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	61.855.000.570
			Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	58.744.401.000
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	80.464.970
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16	Laporan	3.030.134.600
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	100	%	538.054.750
			KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	538.054.750
			Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	70.087.800
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	6.418.650

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	155.509.500
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	123	Laporan	202.121.600
			Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Dokumen	71.622.200
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7	Laporan	28.604.300
			Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	3.690.700
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	2,75	%	845.764.675
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,00	%	
			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	%	845.764.675
			Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	7.588.100
			Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	72.432.950
			Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	Laporan	59.230.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Unit	117.088.800
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	22.252.875
			Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	Dokumen	73.993.250
			Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	429.514.100
			Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen	63.664.600

Selain Perjanjian Kinerja, dalam melaksanakan kegiatan dalam satu tahun anggaran kerja, BPKPD Kota Banjar membuat Rencana Aksi Kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2023. Rencana aksi ini menjadi pedoman yang menyajikan program dan kegiatan serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2023. Uraian Rencana Aksi BPKPD Kota Banjar Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA AKSI PERUBAHAN ANGGARAN SASARAN TAHUN 2023
BPKPD KOTA BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
			1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD	Nilai AKIP BPPKAD dan LKD BPPKAD					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		29.207.350,00															
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		21.783.650,00															
				1 Dok	2 Dok		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan Rancangan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Penetapan	7.732.750,00	Sekretaris	√													
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Input data rincian belanja dalam satu kegiatan dengan standar harga sebagai pedoman Mencetak Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun	1.560.000,00	Sekretaris									√					
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Input data rincian belanja dalam satu kegiatan dengan standar harga sebagai pedoman Mencetak Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) yang telah disusun	1.660.000,00	Sekretaris									√					
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Dilakukan penyusunan anggaran kas untuk setiap kegiatan Mencetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun	1.802.000,00	Sekretaris											√			
			2 Dok				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Dilakukan penyusunan anggaran kas untuk setiap kegiatan Mencetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) yang telah disusun	1.560.000,00	Sekretaris	√													
			3 Lap				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kemudian diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kemudian dicetak sebagai dokumen Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kemudian diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	3.883.500,00	Sekretaris	√													
				2 Lap																						
					2 Lap	1 Lap																				
			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja untuk setiap triwulan pada tahun berjalan.	3.585.400,00	Sekretaris	√							√				√		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		7.423.700,00															
			2 Dok				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	- Menyiapkan data pendukung dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran - Membuat jurnal penyesuaian terhadap aplikasi sistem informasi keuangan - Melakukan rekonsiliasi data base dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD - Menyusun Laporan Keuangan SKPD (Unaudited dan Audited) - Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD ke Bidang Akuntansi dan Inspektorat Kota Banjar untuk direviu	7.423.700,00	Sekretaris	√													

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	100%		63.559.005.930,00															
								Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	100%																	
								Opini Laporan Keuangan	100%																	
								Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%																	
								Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya	100%																	
								Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%																	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		999.593.724,00															
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	126.035.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah					√									
										Inventarisasi regulasi terkait							√									
										Penentuan skala prioritas pembangunan daerah dan prioritas program untuk masing-masing urusan								√								
										Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan									√							
										Penyusunan Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS										√						
										Penyampaian Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS dari Ketua TAPD kepada Kepala Daerah										√						
										Penyampaian Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD											√					
										Koordinasi pembahasan Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS bersama TAPD dan DPRD											√					
										Penyiapan dan Penandatanganan KU-APBD dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD															√	
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	116.951.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah									√					
										Inventarisasi regulasi terkait											√					
										Penyusunan Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS											√					
										Penyampaian Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS dari Ketua TAPD kepada Kepala Daerah											√					
										Penyampaian Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD											√					
										Koordinasi pembahasan Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS bersama TAPD dan DPRD											√					
										Penyiapan dan Penandatanganan Perubahan KU-APBD dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD												√				
						30 Dok	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	103.556.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah									√					
										Penyiapan alat dan bahan												√				
										Penyusunan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD												√				
										Penyampaian Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD												√				
										Koordinasi dan Asistensi terhadap SKPD dalam menyusun RKA-SKPD												√	√			
										Koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi RKA-SKPD oleh TAPD dan review RKA-SKPD oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat)												√	√			
										Koordinasi penyempurnaan RKA-SKPD oleh SKPD													√			
										Penyiapan dan Penandatanganan Dokumen RKA-SKPD													√			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
					30 Dok		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan alat dan bahan Penyusunan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Penyampaian Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD Koordinasi dan Asistensi terhadap SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi RKA-SKPD oleh TAPD dan review RKA-SKPD oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat) Koordinasi penyempurnaan RKA-SKPD oleh SKPD Penyiapan dan Penandatanganan Dokumen RKA-SKPD	102.256.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah									√							
			30 Dok				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyusun DPA-SKPD Penyiapan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD Koordinasi penandatanganan dokumen DPA-SKPD	95.484.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√															
						30 Dok	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyusun DPA-SKPD Penyiapan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD Koordinasi penandatanganan dokumen DPA-SKPD	64.450.200,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah												√				
						1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan daerah Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Walikota Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada DPRD Pembahasan Rancangan peraturan daerah bersama TAPD dan badan Anggaran DPRD Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi Penyempurnaan Rancangan peraturan daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Koordinasi penetapan dan pengundangan peraturan daerah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi dan persetujuan pimpinan DPRD Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri	202.879.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah											√					
						1 Dok			1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan kepala daerah Penyampaian Rancangan peraturan kepala daerah kepada Walikota											√							

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan daerah Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Walikota Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada DPRD Pembahasan Rancangan peraturan daerah bersama TAPD dan badan Anggaran DPRD Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi Penyempurnaan Rancangan peraturan daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Koordinasi penetapan dan pengundangan peraturan daerah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi dan persetujuan pimpinan DPRD Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri	187.981.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah								√		√				
					1 Dok				1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Pengumpulan data RKA-SKPD Verifikasi data Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan kepala daerah Penyampaian Rancangan peraturan kepala daerah kepada Walikota Penyampaian Rancangan peraturan kepala daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi Penyempurnaan Rancangan peraturan kepala daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Koordinasi penetapan dan pengundangan peraturan kepala daerah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri											√		√			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	411.723.124,00																	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Menerima SP2D untuk diperiksa kelengkapannya selanjutnya membuat register SP2D, register retribusi dan PAD lainnya	101.560.600,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan data transaksi harian Rek Kas Umum Daerah, Melihat hasil entry data pada Sistem menu Laporan Buku Kas Umum per hari dan membandingkan transaksi dengan rekening koran harian yang diterima dari bank			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan data transaksi harian Rek Kas Umum Daerah, Melihat hasil entry data pada Sistem menu Laporan Posisi Kas Harian dan membandingkan transaksi dengan rekening koran harian yang diterima dari bank			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan Rekening Koran harian dari Bank, Menyiapkan Buku Kas Umum harian, Membuat BA Rekonsiliasi Kas harian berdasarkan data Rekening koran Bank dan data buku kas umum harian dan dokumen lainnya yang diperlukan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan data transaksi harian Rekening Kas Umum Daerah, Melihat hasil entry data pada Sistem menu Laporan Buku Kas Umum per bulan dan membandingkan transaksi dengan rekening koran bulanan yang diterima dari bank			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan Rekening Koran bulanan dari Bank, Menyiapkan Buku Kas Umum Bulanan, Membuat BA Rekon Kas Bulanan berdasarkan data Rekening koran Bank dan data buku kas umum bulanan dan dokumen lainnya yang diperlukan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			4 Dok						4 Dokumen	Menyusun Keputusan Wali Kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Kas Daerah			√			√											
			48 Dok			30 Dok	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	- Mengoreksi anggaran kas setiap SKPD, - Verifikasi DPA dan Rencana Anggaran Kas - Penarikan SPD per program dan per kegiatan - Status draft kemudian di finalkan	60.087.100,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√									√					
						5 Dok	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	Membuat LKT yang diambil dari SIMTRADA DJPK Kemenkeu RI untuk di verifikasi tanggal masuk, jmlh transfer, dan jenis transfer pusat, LKT dibuat dan dikirim ke KPPN per triwulan	104.881.750,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					1 Dok	1 Dokumen			Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DAK Fisik	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
									Koordinasi dengan APIP	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Koordinasi dengan KPPN	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Menyusun Daftar Kontrak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Menyusun Laporan Realisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DAK Non Fisik			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Admin Pusat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima Bankeu Provinsi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Menyusun Dokumen Penyaluran			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima Bankeu Provinsi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Desa			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan KPPN			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DID			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Admin Pusat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data laporan terkait IWP	35.868.000,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data laporan terkait TAPERA			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			4 Dokumen	Melakukan evaluasi, menyiapkan data kemudian mengumpulkan data Berita Acara Rekonsiliasi BPJS untuk di rekap dan di buat laporan				√						√			√		
						1 Dok			4 Dokumen	Melakukan evaluasi, menyiapkan data kemudian mengumpulkan data Berita Acara Rekonsiliasi TASPEN untuk di rekap dan di buat laporan				√						√			√		
						3 Dok			12 Dokumen	Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan bidang pengelolaan pendapatan.	60.420.050,00	Kepala Bidang Perbendaharaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						3 Dok			12 Dokumen	Memverifikasi Lap Daftar Transaksi Harian Belanja (DTH) Daerah dari SKPD dengan Buku Pembantu Pajak per SKPD, Register SP2D, dan potongan PFK lainnya untuk selanjutnya dibuat Laporan. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Daerah, dan RTH diupload melalui aplikasi SINERGI ke Kementerian Keuangan setiap bulan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						4 Dok			14 Dokumen	Menyampaikan hasil verifikasi dan kompilasi data Laporan DTH dari SKPD setiap bulan ke KPP Pratama Ciamis dan ke KPPN Tasikmalaya untuk diverifikasi kesesuaian transaksi dan NTPN dan selanjutnya dibuat laporan bulanan penerimaan Pajak Pusat yang dilengkapi dengan NTPN yang sudah dinyatakan valid oleh KPP Pratama Ciamis dan KPPN Tasikmalaya selanjutnya dibuat berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Banjar, KPP Pratama Ciamis dan KPPN Tasikmalaya setiap semester.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					1 Dok		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Menelaah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.725.800,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah												√		
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Banjar															√	
						2 Dok			2 Dokumen	Menelaah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah															√	
			60 Orang				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	Koordinasi dengan lembaga terkait	39.179.800,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		292.688.512,00															
			3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	- Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyampaikan data yang diperlukan - Melakukan kompilasi laporan Keuangan bulanan	91.649.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1 Lap				1 Laporan	- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan realisasi keuangan dan anggaran																
			3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap			12 Laporan	- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD untuk menyampaikan laporan SPJ Fungsional bulanan memuat perkembangan/ perubahan kondisi selama satu bulan yang bersangkutan - Melakukan verifikasi SPJ fungsional bulanan pada seluruh Perangkat Daerah			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			42 Lap				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan	- Surat Edaran permintaan data-data pendukung Laporan Keuangan dari SKPD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Unaudited/ audited - SKPD melakukan Rekonsiliasi data pendukung Laporan Keuangan SKPD Unaudited/ audited	118.154.500,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	√													
					42 Lap				42 Laporan	- Laporan Keuangan Daerah (LKD) Unaudited/audited disampaikan ke Inspektorat Kota Banjar untuk direview - Setelah hasil Review Inspektorat dan hasil pemeriksaan tim pemeriksa keuangan BPK perwakilan Jawa Barat, terbitlah Laporan Keuangan Daerah (LKD) Audited/audited																
					1 Lap				1 Laporan	- Menyiapkan data-data pendukung neraca - Menyiapkan data-data pendukung Laporan Operasional - Melakukan entri data saldo awal dari buku besar																

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	- Menyusun Draft Raperda - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Melakukan Hearing dengan DPRD Kota Banjar - Dilakukan Evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat	75.232.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					√									
					1 Dok				1 Dokumen	- Menyusun Draft Raperwal - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi							√									
					1 Dok		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Koordinasi dengan Bidang Pendapatan tentang Penyetoran Lunas sesuai dg SK Pembebanan, terbit STS dari Bank atas pelunasan TGR, membuat draft SK Pelunasan	7.653.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					√									
					1 Dok				1 Dokumen	- Menyusun Draft - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Mendistribusikan Peratutran Wali Kota							√									
					1 Dok				1 Dokumen	- Menyusun Draft - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Mendistribusikan Peratutran Wali Kota								√								
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		61.855.000.570,00															
						1 Lap	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	- Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL - Koordinasi dengan Desa - Koordinasi dengan KPPN	58.744.401.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Lap	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data untuk permohonan penyaluran BTT yang telah di verifikasi Kesesuaian Besar Penyaluran BTT yang sesuai dengan SK Kepala Daerah beserta Disposisi Kepala BPPKAD, kemudian dokumen tersebut di verifikasi PPTK serta nota dinas pencairan BTT, Ketersediaan Dana di SPD serta SPP dan SPM Penyaluran BTT yang telah di buat serta sudah memenuhi syarat untuk di terbitkan SP2D	80.464.970,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						16 Lap	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	- Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL - Koordinasi dengan Desa	3.030.134.600,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Manajemen Aset	100%		538.054.762,00															
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		538.054.762,00															
					1 Dok		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Melakukan pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengajukan usulan standar harga tahun yang akan datang Perangkat Daerah mengajukan usulan standar harga	70.087.800,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√													

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Menghimpun dan merekapitulasi pengajuan usulan standar harga						√											
									Melakukan survey harga pasar oleh pihak ketiga							√	√									
									Menelaah hasil survey harga								√									
									Penetapan standar satuan harga									√								
				1 Dok			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Melakukan pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengajukan rencana kebutuhan barang	6.418.650,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√													
									Perangkat Daerah mengajukan data BMD yang dibutuhkan					√												
									Melakukan rekapitulasi pengajuan data BMD yang dibutuhkan dari PD					√												
									Melakukan telaahan atas pengajuan data BMD dari PD						√											
						1 Dok			Penetapan rencana kebutuhan BMD							√										
									Melakukan pendataan terhadap belanja modal yang sudah direalisasikan									√								
									Dilakukan penyusunan dokumen realisasi belanja modal																√	
						4 Lap	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Menerima dan mencatat laporan penatausahaan persediaan dari Pengurus Barang dari Perangkat Daerah	155.509.500,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah				√				√			√		√	
						70 Lap	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Laporan	Melakukan pengajuan sertifikat tanah milik pemkot Banjar ke BPN	202.121.600,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Melakukan pengamanan tanah milik pemkot banjar dengan memasang papan nama tanah milik				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Dilakukan pendataan BMD yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis	71.622.200,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			2 Dokumen	Dilakukan pengecekan BMD yang diajukan dalam permohonan						√						√				
						1 Dok			4 Dokumen	Dilakukan pengecekan BMD yang diajukan dalam permohonan					√										√	
						1 Dok			2 Dokumen	Melakukan pemeriksaan kelayakan dan penilaian terhadap BMD						√									√	
									Mengajukan laporan hasil pemeriksaan BMD yang mau dihapuskan ke Wali Kota																√	
									Terbit SK Wali Kota tentang pengapusan BMD dari pencatatan																√	
				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan dan Aset Tetap triwulan dengan Pengurus Barang	28.604.300,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah			√							√		√	
										2 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan dan Aset Tetap semester dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah														√	
						1 Lap	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan tahunan dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.690.700,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah						√							√	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	100%		845.764.687,00															
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%		845.764.687,00															
						2 Dok	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Meminta data dari 20 Perangkat Daerah beserta Unit Perangkat Daerah Pengelola PAD	7.588.100,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah									√					
									Merekap data dari 20 Perangkat Daerah Pengelola PAD beserta Unit Perangkat																	
									Membuat laporan dari hasil rekap data dari 20 Perangkat Daerah Pengelola PAD beserta Unit Perangkat																	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar 2021-2023, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

➤ **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

➤ **Indikator Sasaran Strategis**

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKPD Kota Banjar telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar nomor 800/Kpts.185-BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti bulanan, triwulanan, semesteran maupun laporan kegiatan lainnya;
2. Data eksternal, sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, sehingga diperoleh angka capaian kinerja melalui rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, berikut adalah tabel capaian IKU BPKPD Tahun 2023:

Tabel 3.2

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	21%	20,07%	95,57%
3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	73	-	-
		LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023 yang telah disepakati, dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran untuk mengetahui capaian kinerja di Tahun 2023. Adapun tabel realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja BPKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Indikator Program	Target	Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	WTP	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI			Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	16,75	37,44
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			89,71	77,41	
	Opini Laporan Keuangan			WTP	-	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			0,10	2,63	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya			2,04	1,95	
	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			100	100	
Manajemen Aset	100	100				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	21	20,07	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Rasio PAD	2,75	17,33
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			0,00	-14,91	
3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	73	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
	LKD BPKPD Tepat Syarat			100	100	

*Berdasarkan LRA Unaudited

Berdasarkan tabel 3.2.1 yang menunjukkan capaian kinerja BPKPD Tahun 2023, capaian realisasi pada tahun 2023 diperoleh dari Laporan Keuangan Unaudited 2023. Pernyataan kinerja sasaran strategis terkait perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah”

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini mengacu pada rumus perhitungan Opini Laporan Keuangan dari BPK RI. Tahun 2023 BPKPD menargetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi untuk realisasi targetnya belum diketahui karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Maka capaian kinerja dari sasaran strategis ini belum bisa diketahui.

Sasaran strategis ini dicapai dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Outcome Program Pengelolaan Keuangan Daerah ada 6 (enam) indikator yang diambil dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yaitu:

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
3. Opini Laporan Keuangan
4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
5. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya
6. Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Indikator Opini Laporan Keuangan belum diketahui hasilnya karena pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh BPK RI masih berlangsung. Indikator Persentase Akses publik terhadap informasi laporan keuangan daerah belum diketahui hasilnya karena beberapa data yang diperlukan untuk upload ke website masih dalam proses pemeriksaan.

Realisasi indikator di atas dihitung masih menggunakan Laporan Unaudited karena pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah masih berlangsung.

Sedangkan untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 (satu) *outcome*, yaitu Manajemen Aset yang di dalamnya ada 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Apakah ada daftar aset tetap
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap
3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan

4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran

Indikator Manajemen Aset sudah diketahui hasilnya karena eviden yang dibutuhkan sudah terpenuhi, yaitu:

- Adanya daftar aset tetap,
- Manual untuk Menyusun daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan berupa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
- Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran yaitu nilai Aset tercantum di dalam Neraca.

➤ **Sasaran Strategis 2:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”

Capaian kinerja Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 20,07% sebagai kontribusi PAD terhadap APBD Kota Banjar. Hal ini menunjukkan capaian kinerja pada Tahun 2023 sangat tinggi dimana realisasi kinerja sebesar 95,57%.

Sasaran strategis ini dicapai dengan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai 2 (dua) indikator yang diambil dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yaitu Rasio PAD dan Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD. Hasil perhitungan kedua indikator sudah diketahui hasilnya namun angka yang digunakan dalam perhitungan masih menggunakan Laporan Unaudited.

➤ **Sasaran Strategis 3:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Meningkatkan Kualitas AKIP dan LKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah”

Realisasi capaian untuk Nilai AKIP BPKPD Tahun 2023 belum diketahui hasilnya karena masih menunggu penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar. Sedangkan realisasi indikator kinerja LKD BPKPD sesuai dengan SAP sebesar 100% atau mencapai 100% menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan laporan keuangan BPKPD memuat 5 (lima) komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sasaran strategis ini dicapai dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk perhitungan didapat dengan menghitung rata-rata capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan.

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi BPKPD Kota Banjar Tahun 2023, selanjutnya membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2023 dengan Tahun 2022. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun 2022					Tahun 2023						
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	20%	18,98%	94,9%	2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	21%	20,07%	95,57%
3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	72	72,02%	100,03%	3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	73	-	-
		LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%			LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.2.2, diketahui bahwa terdapat perbandingan pencapaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2023, penjabarannya adalah sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Aset Daerah”

Pada Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga untuk Tahun 2023 diharapkan akan memperoleh hasil yang sama seperti tahun lalu sesuai target kinerja. Perbandingan dengan capaian kinerja belum dapat dilakukan karena indikator kinerja masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.

➤ **Sasaran Strategis 2:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”

Tahun 2022, target kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 20% realisasi sebesar 18,98% dengan capaian kinerja 94,9%. Pada Tahun 2023 target kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 21% dengan realisasi sebesar 20,07% sehingga capaian realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 95,57%.

➤ **Sasaran Strategis 3:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Meningkatkan Kualitas AKIP dan LKD BPKPD”

Pada Tahun 2022 nilai capaian AKIP yang diperoleh oleh BPKPD Kota Banjar sebesar 72,02 (BB) melebihi target sebesar 72. Realisasi capaian untuk Nilai AKIP BPKPD Tahun 2023 belum diketahui hasilnya karena masih menunggu penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar. Untuk capaian pada Tahun 2023 diharapkan nilai AKIP dapat meningkat sesuai dengan target sebesar 73.

Realisasi capaian LKD BPKPD Tepat Syarat Tahun 2022 yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan laporan keuangan BPKPD memuat 5 komponen laporan keuangan. Begitupun Tahun 2023 realisasi indikator kinerja LKD BPKPD sesuai dengan SAP sebesar 100% atau mencapai 100 % menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan laporan keuangan BPKPD memuat 5 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir Restra	Realisasi Capaian Sampai dengan 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	20%	18,98%	94,9%	21%	20,07%	95,57%
Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD	Nilai AKIP BPKPD	72%	72,02	100,03%	73%	-	-
	LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan tersebut dapat dijabarkan setiap sasaran strategis sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Aset Daerah”

Untuk sasaran strategis ini realisasi indikator kinerja Tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra BPKPD periode 2021-2023, karena realisasi kinerja tahun ini masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI. Namun diharapkan hasil yang akan diperoleh akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai target tahun ini begitupun sesuai target akhir rencana strategis.

➤ **Sasaran Strategis 2:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”

Pada Tahun 2023, untuk sasaran strategis ini memperoleh realisasi kinerja sebesar 20,07% dari target sebesar 21%. Sedangkan target akhir pencapaian Renstra BPKPD Tahun 2019-2023 untuk kontribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar 21%. Maka persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 adalah sebesar 95,57%. Dengan kategori capaian sangat tinggi ini diharapkan untuk kedepannya nilai Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat sesuai target yang telah ditentukan.

➤ **Sasaran Strategis 3:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD”

Untuk realisasi kinerja capaian Nilai AKIP BPKPD Tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan target akhir pencapaian Perubahan Renstra BPKPD Tahun 2021-2023 karena masih menunggu penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar. Target akhir Perubahan Renstra BPKPD Tahun 2021-2023 untuk Nilai AKIP adalah 73.

Sedangkan untuk capaian realisasi indikator kinerja LKD BPKPD sesuai dengan SAP sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPKPD periode 2018 - 2023, maka realisasi indikator kinerja sampai tahun 2022 sebesar 100% telah mencapai 100% dari target akhir sampai periode Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang sangat sesuai dengan perencanaan Renstra yang diharapkan, diharapkan dapat mewujudkan realisasi dan informasi tentang asset, kewajiban, ekuitas dan posisi uang pemerintah daerah.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk BPKPD Kota Banjar belum ada, sehingga belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pada Tahun 2023 BPKPD Kota Banjar telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Perubahan Rencana Strategis

BPKPD Kota Banjar Tahun 2021-2023. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan pencapaian, dilakukan analisis atas capaian sasaran strategis BPKPD Kota Banjar dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	-	-

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Opini Laporan Keuangan dari BPK RI dengan target WTP yang diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumus perhitungan berdasarkan kategori Opini BPK-RI atas hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjar.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Banjar kembali berhasil meraih pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjar dan penghargaan atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut ke-14 kalinya. Hal ini tentunya menjadi acuan atau target di Tahun 2023 ini untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Banjar. Capaian pada Tahun 2023 belum diketahui realisasinya karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama tahun 2023 dalam mempersiapkan LKD Kota Banjar Tahun 2023 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam mewujudkan target kinerja tersebut di Tahun 2023 diperlukan adanya upaya atau strategi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti:

- 1) Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan;
- 2) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- 4) Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- 5) Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan;
- 7) Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target Tahun 2023 sebesar 21%. Kontribusi PAD terhadap APBD diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Target PAD}}{\text{Total Target Pendapatan APBD}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Kontribusi PAD terhadap APBD	21%	20,07%	95,57%

Kontribusi PAD terhadap APBD bertujuan untuk melihat sejauh mana kemandirian daerah dalam pembiayaan belanja yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi nilai PAD maka akan semakin kecil ketergantungan daerah akan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kontribusi PAD Tahun 2023 sebesar 95,57%.

Faktor penyebab tidak tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Kontribusi PAD terhadap APBD dikarenakan penyesuaian target dari tahun sebelumnya dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar.

Tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja, diantaranya yaitu:

1. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah masih rendah.
2. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam mengelola PAD;
Upaya yang telah dilakukan oleh BPKPD dalam meningkatkan PAD, yaitu:
 1. Melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, melalui spanduk, baliho, media elektronik, dan media cetak;
 2. Bekerja sama dengan beberapa pihak seperti traveloka, tokopedia dan indomaret melalui Bank BJB Kota Banjar agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak secara *online*;
 3. Integrasi data kependudukan dengan Disdukcapil Kota Banjar sehingga mempermudah BPKPD dalam mengambil data kependudukan Kota Banjar untuk kepentingan tentang wajib pajak;
 4. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada;
 5. Memaksimalkan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; dan
 6. Pemasangan *tapping box* di rumah makan, restoran dan tempat hiburan agar capaian PAD lebih optimal.

Untuk kedepannya diharapkan penggalian potensi PAD Kota Banjar semakin meningkat, mengingat lokasi Kota Banjar yang strategis yaitu pintu masuk wilayah Jawa Barat.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator:

- (1) Nilai AKIP BPKPD dan;
- (2) LKD BPKPD Tepat Syarat.

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai AKIP BPKPD	73	-	-
LKD BPKPD Tepat Syarat	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel, Nilai AKIP BPKPD Tahun 2023 belum bisa diketahui karena masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kota Banjar. Secara keseluruhan BPKPD telah menyelenggarakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sesuai dengan ketentuan, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. Berdasarkan laporan hasil evaluasi pada tahun lalu, untuk meningkatkan penilaian AKIP yang lebih baik, dilakukan perbaikan di antaranya, sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi kinerja dalam laporan kinerja sesuai dengan pedoman, salah satunya melengkapi data analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan

Dengan upaya tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan nilai AKIP BPKPD Kota Banjar Tahun 2023.

Indikator lain dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas AKIP dan LKD BPKPD yaitu LKD BPKPD Tepat Syarat dengan capaian pada tahun ini adalah 100%. Keberhasilan ini tentunya didukung dengan upaya-upaya untuk mencapai target yang diharapkan, laporan keuangan BPKPD memuat 5 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program di BPKPD Kota Banjar adalah Rp74.249.694.813,00, sementara anggaran biaya untuk semua program yaitu Rp75.026.361.328. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya adalah 1,04%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan yaitu mendayagunakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada untuk mencapai target sub kegiatan. Selain itu beberapa sub kegiatan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai jasa konsultansi dan nara sumber.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKPD Kota Banjar 2023, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.6
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKPD Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12	
Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD		Nilai AKIP BPKPD	Score	73	-							
		LKD BPKPD Tepat Syarat	%	100	100	100						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	10.083.536.033	9.937.853.772	145.682.261	98,56%	1,44%
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100	100	100	21.783.650	21.221.100	562.550	97,42%	2,58%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	7.732.750	7.556.700	176.050	97,72%	2,28%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	1.560.000	1.558.000	2.000	99,87%	0,13%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	1.660.000	1.643.000	17.000	98,98%	1,02%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	1.802.000	1.731.800	70.200	96,10%	3,90%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	1.560.000	1.558.000	2.000	99,87%	0,13%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	100	3.883.500	3.720.200	163.300	95,80%	4,20%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	3.585.400	3.453.400	132.000	96,32%	3,68%
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			100	100	100	7.266.711.953	7.187.457.293	79.254.660	98,91%	1,09%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	55	55	100	7.224.216.253	7.145.493.393	78.722.860	98,91%	1,09%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	350	350	100	35.072.000	34.679.300	392.700	98,88%	1,12%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100	7.423.700	7.284.600	139.100	98,13%	1,87%
	ADMINISTRASI BARANG MILIH DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			100	100	100	39.222.500	39.026.207	196.293	99,50%	0,50%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	100	39.222.500	39.026.207	196.293	99,50%	0,50%
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			100	100	100	47.793.500	44.157.200	3.636.300	92,39%	7,61%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	53	53	100	47.793.500	44.157.200	3.636.300	92,39%	7,61%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			100	100	100	570.697.100	559.480.216	11.216.884	98,03%	1,97%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	39.250.000	39.072.000	178.000	99,55%	0,45%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	89.454.450	85.929.990	3.524.460	96,06%	3,94%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	8	100	28.495.600	27.674.750	820.850	97,12%	2,88%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	44.709.600	43.744.510	965.090	97,84%	2,16%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	81.983.200	80.930.875	1.052.325	98,72%	1,28%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	66	66	100	6.630.000	3.930.000	2.700.000	59,28%	40,72%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	12.335.000	11.903.000	432.000	96,50%	3,50%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	216.901.000	216.277.691	623.309	99,71%	0,29%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100	50.938.250	50.017.400	920.850	98,19%	1,81%
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100	100	100	258.465.170	257.181.500	1.283.670	99,50%	0,50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18	100	216.465.170	215.723.000	742.170	99,66%	0,34%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	100	42.000.000	41.458.500	541.500	98,71%	1,29%
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100	100	100	1.297.395.800	1.260.311.207	37.084.593	97,14%	2,86%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	586.955.600	569.943.306	17.012.294	97,10%	2,90%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	710.440.200	690.367.901	20.072.299	97,17%	2,83%
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100	100	100	581.466.360	569.019.049	12.447.311	97,86%	2,14%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	29	100	356.213.400	352.801.685	3.411.715	99,04%	0,96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81	81	100	84.950.000	83.782.370	1.167.630	98,63%	1,37%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	87.276.960	85.275.244	2.001.716	97,71%	2,29%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	53.026.000	47.159.750	5.866.250	88,94%	11,06%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100	100	100	63.559.005.870	63.114.479.374	444.526.496	99,30%	0,70%	
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	16,75	37,44	223,52						
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89,71	77,41	86,29						
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	-	-						
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,1	2,63	2.630						
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,04	1,95	95,59						
		Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100						
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			100	100	100	999.593.700	971.005.108	28.588.592	97,14%	2,86%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100	126.035.500	124.344.414	1.691.086	98,66%	1,34%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100	116.951.500	111.745.546	5.205.954	95,55%	4,45%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30	100	103.556.000	103.329.800	226.200	99,78%	0,22%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30	100	102.256.000	99.633.800	2.622.200	97,44%	2,56%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30	100	95.484.000	94.331.950	1.152.050	98,79%	1,21%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30	100	64.450.200	61.091.200	3.359.000	94,79%	5,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100	202.879.500	196.800.498	6.079.002	97,00%	3,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100	187.981.000	179.727.900	8.253.100	95,61%	4,39%
	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH			100	100	100	411.723.100	396.967.418	14.755.682	96,42%	3,58%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	76	76	100	101.560.600	100.026.105	1.534.495	98,49%	1,51%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	78	78	100	60.087.100	59.792.750	294.350	99,51%	0,49%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	11	11	100	104.881.750	104.252.565	629.185	99,40%	0,60%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	10	10	100	35.868.000	35.402.998	465.002	98,70%	1,30%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	38	38	100	60.420.050	59.045.500	1.374.550	97,73%	2,27%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	4	4	100	9.725.800	9.378.000	347.800	96,42%	3,58%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	60	60	100	39.179.800	29.069.500	10.110.300	74,20%	25,80%
	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH			100	100	100	292.688.500	282.291.667	10.396.833	96,45%	3,55%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	25	25	100	91.649.000	87.543.125	4.105.875	95,52%	4,48%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	85	85	100	118.154.500	115.100.392	3.054.108	97,42%	2,58%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	75.232.000	72.372.550	2.859.450	96,20%	3,80%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	3	3	100	7.653.000	7.275.600	377.400	95,07%	4,93%
	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100	100	100	61.855.000.570	61.464.215.181	390.785.389	99,37%	0,63%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100	58.744.401.000	58.741.362.600	3.038.400	99,99%	0,01%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	100	80.464.970	65.076.381	15.388.589	80,88%	19,12%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	16	16	100	3.030.134.600	2.657.776.200	372.358.400	87,71%	12,29%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset		100	100	100	538.054.750	442.034.327	96.020.423	82,15%	17,85%
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			100	100	100	538.054.750	442.034.327	96.020.423	82,15%	17,85%
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100	70.087.800	68.382.854	1.704.946	97,57%	2,43%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100	6.418.650	6.215.000	203.650	96,83%	3,17%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	4	100	155.509.500	146.829.534	8.679.966	94,42%	5,58%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja				REALISASI ANGGARAN				Tingkat Efisiensi Biaya
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=9/8*100	12
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	123	123	100	202.121.600	139.404.939	62.716.661	68,97%	31,03%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	12	100	71.622.200	51.285.000	20.337.200	71,60%	28,40%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	7	7	100	28.604.300	27.095.000	1.509.300	94,72%	5,28%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100	3.690.700	2.822.000	868.700	76,46%	23,54%
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			100	100	100	845.764.675	755.327.340	90.437.335	89,31%	10,69%
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			100	100	100	845.764.675	755.327.340	90.437.335	89,31%	10,69%
	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	100	7.588.100	7.470.000	118.100	98,44%	1,56%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100	72.432.950	72.119.102	313.848	99,57%	0,43%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	3	100	59.230.000	51.044.000	8.186.000	86,18%	13,82%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100	117.088.800	116.446.100	642.700	99,45%	0,55%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	100	22.252.875	22.041.064	211.811	99,05%	0,95%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	3	3	100	73.993.250	73.360.875	632.375	99,15%	0,85%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	100	429.514.100	349.518.296	79.995.804	81,38%	18,62%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	100	63.664.600	63.327.903	336.697	99,47%	0,53%

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2023 untuk mendukung Perubahan Renstra Kota Banjar Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Aset Daerah”

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah opini WTP yang didukung oleh 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah,
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah,
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kedua Program tersebut diampu oleh 4 (empat) bidang di BPKPD. Program tersebut memiliki indikator untuk masing-masing bidang, berikut uraiannya:

1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai indikator kegiatan Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang ditetapkan dengan target 100%, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Sub Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang direncanakan}}$$

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat tinggi. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja:

Tabel 3.2.7.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Perencanaan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	999.593.700	971.005.108	97,14
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	126.035.500	124.344.414	98,66
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	116.951.500	111.745.546	95,55
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	103.556.000	103.329.800	99,78
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	102.256.000	99.633.800	97,44
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	95.484.000	94.331.950	98,79
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	64.450.200	61.091.200	94,79
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	202.879.500	196.800.498	97,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	187.981.000	179.727.900	95,61

2. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai dua indikator kegiatan, yaitu Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan target 100%, dan Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 100%, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Sub Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang direncanakan}}$$

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat tinggi. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja:

Tabel 3.2.7.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Perbendaharaan Daerah Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	411.723.100	396.967.418	96,42
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dok	101.560.600	100.026.105	98,49
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dok	60.087.100	59.792.750	99,51
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dok	104.881.750	104.252.565	99,40
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	10 Lap	35.868.000	35.402.998	98,70

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
	Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dok	60.420.050	59.045.500	97,73
6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	9.725.800	9.378.000	96,42
7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	39.179.800	29.069.500	74,20

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat tinggi. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja:

Tabel 3.2.7.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Perbendaharaan Daerah Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	61.855.000.570	61.464.215.181	99,37	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	58.744.401.000	58.741.362.600	99,99
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	80.464.970	65.076.381	80,88
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	3.030.134.600	2.657.776.200	87,71

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai indikator kegiatan Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai target 100%, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Sub Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang direncanakan}}$$

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat tinggi. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja:

Tabel 3.2.7.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	292.688.500	282.291.667	96,45
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	25 Laporan	91.649.000	87.543.125	95,52
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	85 Laporan	118.154.500	115.100.392	97,42
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kabupaten/Kota	2 Dok	75.232.000	72.372.550	96,20
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	7.653.000	7.275.600	95,07

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai indikator kegiatan Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai target 100%, dengan rumus perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Sub Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang direncanakan}}$$

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat tinggi. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja:

Tabel 3.2.7.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	538.054.750	442.034.327	82,15
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	70.087.800	68.382.854	97,57
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	6.418.650	6.215.000	96,83
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	155.509.500	146.829.534	94,42
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	123 Laporan	202.121.600	139.404.939	68,97
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dok	71.622.200	51.285.000	71,60
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7 Laporan	28.604.300	27.095.000	94,72
7	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	3.690.700	2.822.000	76,46

➤ **Sasaran Strategis 2:**

“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Kontribusi PAD terhadap APBD yang dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Total Target PAD}}{\text{Total Target Pendapatan APBD}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program tersebut diampu oleh 1 (satu) bidang yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada BPKPD. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 20,07%.

1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai indikator kegiatan Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai target 100%, dengan rumus perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Sub Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang direncanakan}}$

Tabel 3.2.7.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	845.764.675	755.327.340	89,31
1	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok	7.588.100	7.470.000	98,44
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	72.432.950	72.119.102	99,57
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	59.230.000	51.044.000	86,18
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	117.088.800	116.446.100	99,45

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	22.252.875	22.041.064	99,05
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dok	73.993.250	73.360.875	99,15
7	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dok	429.514.100	349.518.296	81,38
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dok	63.664.600	63.327.903	99,47

➤ **Sasaran Strategis 3:**

“Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD”

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Nilai AKIP BPKPD dan LKD BPKPD Tepat Syarat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP BPKPD

Indikator nilai AKIP mempunyai target nilai 73, dengan rumus perhitungan dari Inspektorat Kota Banjar. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini belum bisa diketahui karena masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kota Banjar.

2. Indikator Kinerja LKD BPKPD Tepat Syarat

Indikator LKD BPKPD Tepat Syarat mempunyai target nilai 100%, dengan rumus perhitungan LKD BPKPD sesuai SAP. Realisasi capaian kinerja indikator ini adalah 100%, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi.

Kedua sasaran strategis di atas didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan target dan capaian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara mempunyai target 100%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.2.7.6
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Sekretariat BPKPD Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	21.783.650	21.221.100	97,42
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.732.750	7.556.700	97,72
2 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dok	1.560.000	1.558.000	99,87

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
	Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.660.000	1.643.000	98,98
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.802.000	1.731.800	96,10
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.560.000	1.558.000	99,87
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	3.883.500	3.720.200	95,80
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.585.400	3.453.400	96,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.266.711.953	7.187.457.293	98,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org/Bln	7.224.216.253	7.145.493.393	98,91
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dok	35.072.000	34.679.300	98,88
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.423.700	7.284.600	98,13
Administrasi Barang Milih Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Barang Milih Daerah Pada Perangkat Daerah	100	39.222.500	39.026.207	99,50
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	39.222.500	39.026.207	99,50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	47.793.500	44.157.200	92,39
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53 Dok	47.793.500	44.157.200	92,39

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD Kota Banjar Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	570.697.100	559.480.216	98,03	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.250.000	39.072.000	99,55
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.454.450	85.929.990	96,06
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	28.495.600	27.674.750	97,12
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.709.600	43.744.510	97,84
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	81.983.200	80.930.875	98,72
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	66 Dok	6.630.000	3.930.000	59,28
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.335.000	11.903.000	96,50
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	216.901.000	216.277.691	99,71
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	50.938.250	50.017.400	98,19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	258.465.170	257.181.500	99,50	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	216.465.170	215.723.000	99,66
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	42.000.000	41.458.500	98,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.297.395.800	1.260.311.207	97,14	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	586.955.600	569.943.306	97,10

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	710.440.200	690.367.901	97,17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	581.466.360	569.019.049	97,86
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29 Unit	356.213.400	352.801.685	99,04
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Unit	84.950.000	83.782.370	98,63
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	87.276.960	85.275.244	97,71
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	53.026.000	47.159.750	88,94

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2023 jenis belanja pada BPKPD Kota Banjar terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berikut tabel rincian tentang belanja di BPKPD Kota Banjar:

Tabel 3.3
Realisasi BPKPD Belanja Daerah
Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	669.748.947.822,00	659.717.457.645,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.620.648.223,00	27.504.427.133,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	632.128.299.599,00	632.206.850.512,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	6.180.000,00
5	BELANJA DAERAH	75.026.361.328,00	74.249.694.813,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.904.015.588,00	12.519.418.132,00
5.1.1	Belanja Pegawai	7.227.656.253,00	7.148.933.393,00
5.1.2	Belanja Barang Jasa	5.676.359.335,00	5.370.484.739,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	267.345.170,00	266.061.500,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.345.170,00	266.061.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.464.970,00	65.076.381,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	80.464.970,00	65.076.381,00
5.4	BELANJA TRANSFER	61.774.535.600,00	61.399.138.800,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.030.134.600,00	2.657.776.200,00
	Belanja Bantuan Keuangan	58.744.401.000,00	58.741.362.600,00

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja periode 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Tahun 2023 dengan menggunakan metode pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Tingkat keberhasilan atas capaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 adalah berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator kinerja sasaran Opini Laporan Keuangan dari BPK RI belum diketahui hasilnya;
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target 21% mempunyai capaian sebesar 20,07% atau 95,57% dari target dan termasuk dalam kategori sangat tinggi;
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a) Nilai AKIP BPKPD dengan target sebesar 73, untuk realisasi kerjanya belum dapat diketahui;
 - b) LKD BPKPD Tepat Syarat dengan target 100% mempunyai realisasi kegiatan sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam proses pencapaian kinerja dan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar merupakan tantangan dan senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terakomodasi dalam perencanaan serta program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPKPD Tahun 2023 sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya ditunjang dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, potensi sumber daya manusia, serta realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

LAMPIRAN

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{287.515.712.504,00}{767.867.437.284,00} \times 100$	37,44
		4.a.2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	$\frac{132.484.062.375,00}{764.696.108.887,00} \times 100$	17,33
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{594.385.632.698,00}{767.867.437.284,00} \times 100$	77,41
4	Manajemen Keuangan	4.d.1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{767.867.437.284,00}{748.196.117.320,00} - 1 \times 100$	2,63
		4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{132.484.062.375,00}{155.702.286.831,00} - 1 \times 100$	-14,91
		4.d.3	Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap?	Ada	100,00
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ada	100,00
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ada	100,00
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada			100,00		
4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{15.433.555.934,00}{790.679.980.804,00} \times 100$	1,95		

TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI/LHE ATAS IMPLEMENTASI SAKIP BPKPD KOTA BANJAR TAHUN 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI				KETERANGAN
			TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
1	Memperbaiki aspek perencanaan kinerja dengan:						
	a. Penyusunan Cascading sampai pemetaan ke individu dan mencantumkan anggaran pada Cascading	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyusun Cascading sampai pemetaan ke individu dan mencantumkan anggaran pada Cascading				√	
	b. Menyusun dokumen Crosscutting	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyusun dokumen Crosscutting				√	
2	Memperbaiki aspek pengukuran kinerja dengan:						
	a. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja.	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja				√	
	b. Adanya pengukuran capaian kinerja sampai dengan individu.	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyusun dokumen pengukuran capaian kinerja sampai dengan individu				√	
	c. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).						Pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) sebaiknya dilakukan oleh leading sektor (Inspektorat), OPD hanya sebagai user
	d. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional yang mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, atau mengusulkan ke tingkat Pemerintah Kota Banjar agar membuat kebijakan terkait hal ini.						Hal ini bukan kewenangan BPKPD
	e. Melampirkan dokumen kebutuhan pegawai organisasi (dokumen e-bezetting)	Sudah membuat dokumen kebutuhan pegawai organisasi (dokumen e-bezetting)				√	
3	Memperbaiki Aspek Pelaporan Kinerja, dengan:						
	a. Melampirkan pernyataan revidi atas Laporan Kinerja.	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk memenuhi lampiran pernyataan revidi atas Laporan Kinerja				√	
	b. Menyajikan perbandingan kinerja dengan RPJMN (Benchmark Kinerja)	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyajikan perbandingan kinerja dengan RPJMN (Benchmark Kinerja)				√	

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI				KETERANGAN
			TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
4	Memperbaiki Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan:						
	a. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal.	Sudah Menyusun SK Pembentukan Satgas dan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPD			√		
	b. Melampirkan kertas kerja evaluasi internal yang telah dilakukan.	Akan melampirkan kertas kerja evaluasi internal yang telah dilakukan				√	
	c. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun sebelumnya serta dimanfaatkan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja.	Akan diagendakan untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				√	

Banjar, 04 September 2023
 Kepala BPKPD



ASEP MULYANA, S.E.
 NIP. 19761004 200312 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN
SEKRETARIAT BPKPD KOTA BANJAR







BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH TA 2023









BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TA 2023

REKONSILIASI PAJAK



REKONSILIASI KE KEMENTERIAN KEUANGAN



SERAH TERIMA DAN AKTIVASI KKPD



PENANDATANGANAN MOU ANTARA KOTA BANJAR DENGAN PT. BPD JABAR



BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN DAERAH TA 2023

ENTRY SALDO AWAL



PENYERAHAN HASIL EVALUASI RAPERDA APBD TA 2023

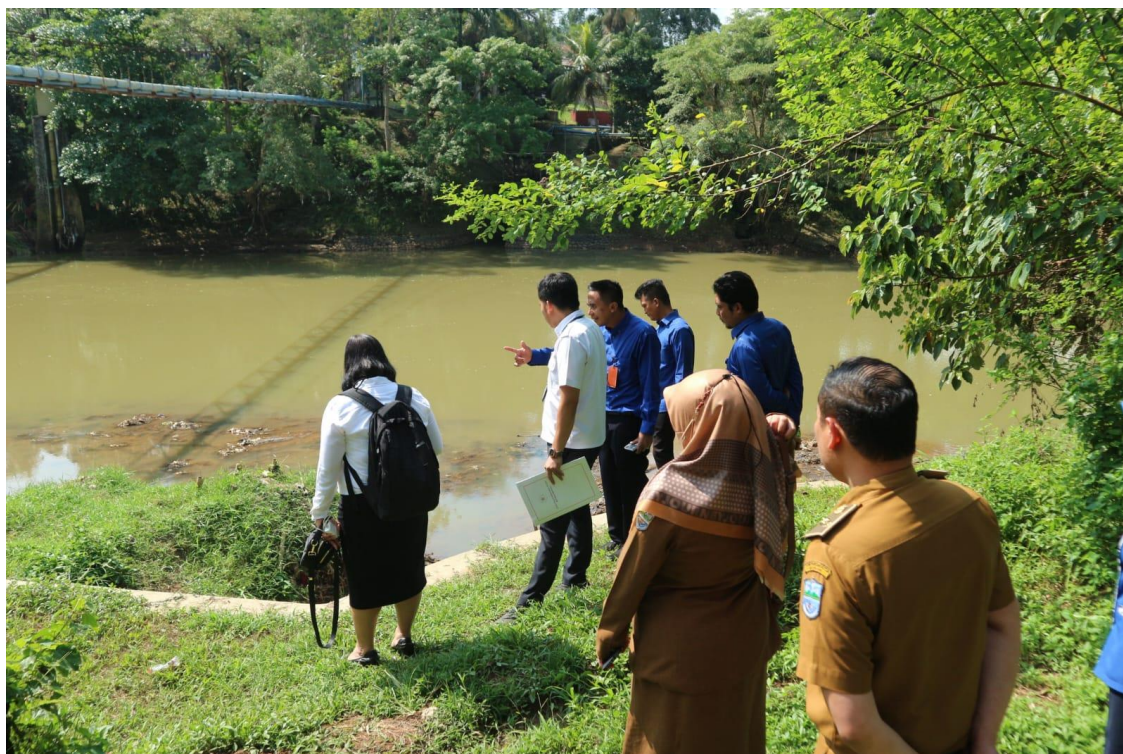


BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TA 2023

CEK LAPANGAN – SERTIFIKASI TANAH



CEK LAPANGAN PERSIAPAN HIBAH KEMEN PUPR



PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH



CEK LAPANGAN – REHAB POSKESLUR



CEK PENGHAPUSAN BMD




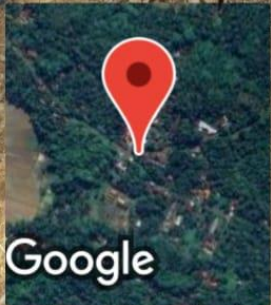
PROSES PEMUSNAHAN BMD



PENGUKURAN TANAH PEMKOT



 **GPS Map Camera**



Kecamatan Cimaragas, Jawa Barat, Indonesia
JFHG+3M4, Rancagede, Cibeureum, Kec. Cimaragas,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46313, Indonesia
Lat -7.372525°
Long 108.476739°
23/06/23 10:48 AM GMT +07:00
KANTOR ATR/BPN KOTA BANJAR adi s



BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TA 2023

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH







